

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asikin, Z., 1993, *Hubungan Industrial Pancasila*, Cet. VII, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Z., 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Badruzaman, M.D., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Y., 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasanuddin, A., 1996, *Hubungan Industrial Pancasila Implementasi Pada Industil Tekstil Di Bandung (Studi Kasus Di PT Unilon Dan PT Tri Sultex)*, Tesis, Bidang Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Husni, L., 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Cet II, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, Cet. IX, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Markeling, I. K., dan Mudana, I. N., 2009, *Hukum Perburuhan*, Cet. I, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Panggabean, H. P., 2001, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta.
- Poerdyatmono, B., 2005, *Asas Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid Beginselen) dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) pada Kontrak Jasa Konstruksi*, Jurnal Teknik Sipil Volume 6 No. 1, Cet. I., Fakultas Teknik Universitas Madura, Pamekasan.
- Simanjuntak, P., 2009, *Manajemen Hubungan Industrial*, Cet. II, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Soemantri, M., 2002, *Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia*, Cet. I, Bank Indonesia, Jakarta.

Widodo, H., dan Yudiantoro, 1989, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan IV Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang *Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*.

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang *Serikat Pekerja/Serikat Buruh*.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

Undang-undang nomor 2 Tahun 2005 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2005 tentang *Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang *Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit*.



Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit.*

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.255/MEN/2003 tentang *Tata Cara Pembuatan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.*

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang *Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.*

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER.32/MEN/XII/2008 tentang *Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/09 tentang *Bank Umum Syariah.*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/09 tentang *Unit Usaha Syariah.*

Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Unit Usaha Syariah di Seluruh Indonesia Nomor 11/28/DPbS tentang *Unit Usaha Syariah.*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang *Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.*

Perjanjian Pengalihan Karyawan antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Ronald Hasudungan Sianturi dan PT. Bank Lippo Tbk.

Artikel

Jejak dan Langkah Perjuangan APINDO, diunduh dari apindo.or.id/images/_res/jejak_langkah_dan_perjuangan_apindo.pdf pada tanggal 30 April 2010.

BNI Syariah, diunduh dari <http://www.bni.co.id/Syariah/TentangKami/tabid/367/Default.aspx>, pada tanggal 10 Mei 2010.

Profil Organisasi APINDO, diunduh dari <http://apindo.or.id/index.php/static/organisasi/organisasi> pada tanggal 30 April 2010.

Kemenakertrans Jajaki Pembentukan Tripartit Sektoral, diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t4b6d4bac8a5df/kemenakertrans-jajaki-pembentukan-tripartit-sektoral>, pada tanggal 8 Februari 2010.

Perbankan Syariah, diunduh dari <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/> pada tanggal 16 Agustus 2009.

Sejarah Bank Syariah Bukopin, diunduh dari http://www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=sub_contents&a=2&b=1 pada tanggal 7 Mei 2010.

Sejarah Bank Syariah Mandiri, diunduh dari <http://www.syariahmandiri.co.id/banksyariahmandiri/sejarah.php> pada tanggal 7 Mei 2010.

Sekilas Bank Mega Syariah, diunduh dari <http://www.bsmi.co.id/Profil-SekilasBSMI.php> pada tanggal 7 Mei 2010.

Sejarah BRI Syariah, diunduh dari http://www.brisyariah.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4 pada tanggal 7 Mei 2010.

Lain-Lain:

Mahkamah Agung RI, *Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tanggal 8 – 10 Oktober 2009.*

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistic) Desember 2009*, Bank Indonesia, Jakarta, 2009.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung, *Laporan Akhir Kajian Kebijakan dan Aspek Strategis Pelaksanaan Spin-Off Unit Usaha Syariah, Jakarta, 2009.*